

Ketua DPRD Ungkap Proyeksi Penurunan APBD 2025 Pembangunan Harus Tetap Berjalan Maksimal



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* *Senin, 22/07/2024*

TENGGARONG – Saat Rapat Paripurna Ke-14, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) di ruang sidang utama, perhatian tertuju pada satu poin penting. Yakni, proyeksi penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2025.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid didampingi oleh Wakil Ketua I, Alif Turiadi dan Wakil Ketua II, Didik Agung Eko Wahono serta seluruh anggota DPRD Kukar.

Abdul Rasid dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (18/7/2024) itu, menyampaikan kekhawatiran yang muncul dari Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Dokumen tersebut yang dibacakan oleh Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono mengungkapkan bahwa pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan tajam. Jika pada 2024 APBD Kukar mencapai Rp12,44 triliun, maka untuk tahun 2025 diprediksi hanya mencapai Rp7,31 triliun.

“Kemungkinan APBD 2025 ada penurunan menjadi Rp7,31 triliun. Kita berdoa, kan masih berproses, mudah-mudahan ada anggaran tambahan lagi sehingga bisa meningkatkan APBD kita,” ujar Rasid.

Penurunan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana pemerintah daerah akan mengelola sumber daya yang lebih terbatas.

Rasid menekankan pentingnya peran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar dalam mengawal pembahasan lebih lanjut, terutama terkait proyek-proyek penting yang harus diselesaikan sesuai target.

Dalam rancangan KUA PPAS 2025, pendapatan Kukar diproyeksikan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,09 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp6,21 triliun.

Rasid menggarisbawahi beberapa proyek yang menjadi prioritas. Seperti pembangunan Pasar Tangga Arung, Jembatan Sebulu, infrastruktur jalan di Desa Jongkang, serta jalan di Kecamatan Anggana dan Tabang.

“Mudah-mudahan dengan APBD yang ada ini bisa membuat pembangunan di Kukar berjalan maksimal, terutama infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya,” tambah Rasid, optimistis.

Suasana rapat tersebut penuh dengan diskusi dan perencanaan strategis, mengingat pentingnya alokasi anggaran yang efisien untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di Kukar, meski dengan anggaran yang lebih ketat.

Harapan tinggi dari para pemimpin daerah bahwa meskipun menghadapi tantangan finansial, komitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kukar akan tetap menjadi prioritas utama. **(adv/far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Ketua DPRD Ungkap Proyeksi Penurunan APBD 2025
Pembangunan Harus Tetap Berjalan Maksimal, 22/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Dalam Pasal 3 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.